

## ABSTRAK

### **MANGGA SALI, Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penangkapan Ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Rudi Hardi)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat nelayan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya dan ini berdampak pada PAD dan pelaporan jumlah hasil tangkapan ikan di Selayar ke pusat tidak sesuai dengan jumlah hasil yang sesungguhnya atau data sebenarnya. Sehingga pemerintah daerah mempunyai strategi untuk pencegahan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*). Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penangkapan Ikan Yang Tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 7 orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang penulis teliti : DPRD Kepulauan Selayar, Satpol-Airut Resort, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dan Masyarakat Nelayan. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang berupa observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi pemerintah daerah dalam pencegahan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan *Unreported Fishing* dalam memberikan sosialisasi melalui pembinaan dan pelatihan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat nelayan tentang cara yang benar dalam penangkapan ikan sesuai dengan peraturan pemerintah dan sebagaimana dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sosialisasi juga diberikan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan masyarakat nelayan dalam mengelola hasil tangkapan. Pengawasan melakukan pembatasan wilayah penangkapan ikan yang hanya boleh dilakukan 4 mil dari pantai. Penegakan hukum dilakukan agar setiap kapal nelayan harus memenuhi aturan dan kriteria Surat Isin Penangkapan Ikan (SIPI), penetapan zona penangkapan, jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan yang tidak sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap (total allowable catch) sesuai yang tertuang dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan

*Kata kunci : Strategi, Pemerintah Daerah, Unreported Fishing*